

TABLOID REFERENSI PEMILU 2024

# info indonesia

MINGGU IV | JULI 2023



SUARAMU  
UNTUK  
PEMILU 2024



**AGENDA GOLKAR  
DIGOYANG  
MUNASLUB**

**TANTANGAN  
PARTAI BARU  
MENUJU SENAYAN**

**SATUKAN KADER  
HIJAUKAN JAKARTA**

**BANYAK SYARAT  
MILIH CAWAPRES**

**REBUTAN  
PENGARUH  
JOKOWI**

**PAN MAKIN  
DEKAT NAHDLIYIN**

**PRAJURIT TNI  
SUDAH PASTI NETRAL**

**SERANGAN FAJAR  
BUKAN BERKAH**

**KPU SEKARANG  
KURANG GARANG**

**JAGA LUMBUNG  
SUARA BANTENG**

**ERICK THOHIR  
JADI CAWAPRES  
SIAPAPUN CAPRESNYA  
PASTI MENANG**



“Para capres berharap mendapatkan dukungan dari pemilih inti Jokowi bila dianggap dekat atau memperjuangkan program-program Jokowi”

Arya Fernandes



# REBUTAN PENGARUH JOKOWI

**Sejumlah bakal calon presiden terus mengasosiasikan diri dengan Presiden Joko Widodo. Tak hanya menyebarkan momen kebersamaan yang diunggah melalui akun media sosial, ada pula amplifikasi pesan yang disampaikan Jokowi kepada mereka untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2024.**

Upaya untuk mendapatkan efek elektoral dari kedekatan dengan Presiden Jokowi semestinya tak sekadar ditunjukkan dengan gimik. Tetapi juga gagasan dan visi orisinal mereka dalam melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi sepanjang 2014-2024.

Upaya untuk mengasosiasikan diri dengan Presiden Jokowi, salah satunya terlihat saat Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo, menghadiri Silaturahmi 1 Muharam 1445 H Relawan Pendukung Ganjar di bilangan Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2023.

Di hadapan massa yang terdiri atas pimpinan berbagai kelompok sukarelawan, Ganjar bercerita bahwa dirinya juga bagian dari sukarelawan yang turut berkontribusi pada kemenangan Presiden Jokowi. Sejak saat itu hingga kini, dirinya, sukarelawan, dan Jokowi disebut sama-sama memiliki mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Setelah ditetapkan sebagai bakal capres, Ganjar kerap berdiskusi dengan Presiden Jokowi. Terakhir, dalam pertemuan selama 30 menit di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), beberapa pekan lalu, keduanya berbincang mengenai dinamika politik kekinian.

“Saya orang yang sangat intensif dengan Pak Jokowi. Kami bicara politik luar negeri, dalam negeri, sampai pada politik yang sangat praktis,” ungkap Ganjar.

Dalam kesempatan lain, ketika sedang makan siang bersama, Presiden Jokowi dan Ganjar pun bercerita tentang banyak hal. Salah satunya membicarakan soal kelompok sukarelawan.

Ganjar mengingat, Jokowi masih bisa menyebutkan satu per satu kelompok sukarelawan pendukungnya se-

cara detail. Tak hanya memahami situasi kebatinan setiap kelompok sukarelawan pendukungnya, Presiden Jokowi juga tak pernah memutus komunikasi dengan mereka selama dua periode kepemimpinannya.

Menurut Ganjar, itu menjadi hubungan yang besar, bahkan mampu mengubah lanskap politik. Kedekatan Presiden Jokowi itu yang membuat kini posisi sukarelawan turut diperhitungkan dalam kancah politik nasional.

“Sampai pada akhirnya, beliau memberikan sebuah kertas kepada saya. Pak Ganjar, mungkin ini bagus. Saya lihat, saya bolak, saya balik, karena apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini. Bapak, Ibu, Teman-teman, bahkan beliau pun sangat perhatian sampai detail baju merekomendasikan untuk saya pakai,” ungkap Ganjar yang mengenakan kemeja lengan pendek bermotif garis vertikal hitam putih.

Pakaian yang sama juga dikenakan oleh massa sukarelawan pendukungnya. Bagi Ganjar, motif hitam dan putih yang diberikan Jokowi kepadanya itu merepresentasikan dirinya yang tidak bersikap abu-abu dalam mengambil keputusan sulit. Ia pun berharap sikap demikian sudah diambil para sukarelawan dalam mendukungnya di Pilpres 2024.

“Saya yakin, yang hadir di sini juga sudah memilih pada sikap itu,” ujarnya.

Sehari sebelum pertemuan Ganjar dengan sukarelawan pendukungnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, juga untuk kesekian kalinya mengunggah foto makan siang bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu, 16 Juli 2023.

Dalam foto itu, Prabowo tak hanya bersama dengan Presiden Jokowi, tetapi juga ditemani Menteri BUMN, Erick Thohir. Meski bukan kader partai politik, Erick be-

kangan diusulkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar atau Prabowo.

Dalam unggahan tersebut, Prabowo menuliskan, dirinya dan Erick tengah menerima arahan dari Presiden. Arahan dimaksud terkait dengan industri pertahanan nasional yang harus semakin kuat dan maju.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, dalam pertemuan itu, Jokowi, Prabowo, dan Erick memang membahas tentang industri pertahanan dalam negeri. Sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN, Prabowo dan Erick harus bisa mengeksekusi keinginan Presiden Jokowi untuk memajukan industri tersebut. Untuk menindaklanjutinya, Prabowo pun kembali bertemu dengan Erick dan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani.

Andre tidak memungkiri, pertemuan itu bisa saja diartikan berbeda, mengingat posisi Prabowo sebagai bakal capres Gerindra dan Erick sebagai salah satu sosok yang diusulkan untuk mendampingi Prabowo.

Prabowo juga kerap disebut sejumlah pihak mendapatkan sinyal dukungan dari Presiden Jokowi. Sinyal dukungan itu pun diakui Gerindra berpengaruh signifikan pada peningkatan elektabilitas Prabowo dalam beberapa bulan terakhir.

“Pertemuan mereka bertiga dalam rangka koordinasi industri pertahanan. Kalau ada muatan yang lain, saya tidak tahu. Kalau diterjemahkan pihak lain ada pembic-

araan politik, saya tidak tahu,” ujarnya.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, melihat, para tokoh bakal capres menyadari bahwa Presiden Jokowi memiliki pengaruh kuat secara politik, baik ditunjukkan dari sisi kepuasan publik yang konsisten tinggi dalam setahun terakhir maupun dari sisi hubungan dengan para elite politik dan ekonomi.

Kedua hal itu tidak sekadar membuat Presiden Jokowi berpengaruh kuat dalam Pilpres 2024, tetapi pergerakan politiknya juga sangat memengaruhi perbincangan terkait pemilu. Oleh karena itu, wajar jika para bakal capres berupaya untuk mengasosiasikan diri dengan Presiden Jokowi. Sebab, hal itu juga bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para pemilih loyal Presiden Jokowi untuk memberikan suaranya kepada mereka pada 2024.

“Para capres berharap mendapatkan dukungan dari pemilih inti Jokowi bila dianggap dekat atau memperjuangkan program-program Jokowi,” ujarnya.

Meski demikian, setelah melewati lima kali pemilu, jumlah pemilih kritis akan semakin banyak. Upaya para bakal capres menunjukkan gimik politik, seperti menggambar kedekatan dengan Presiden Jokowi diperkirakan tidak akan memberi efek signifikan bagi pemilih.

Apalagi, Pemilu 2024 bakal didominasi oleh pemilih dari kalangan milenial yang umumnya berkarakter rasional dan kritis. Untuk itu, mereka perlu menunjukkan langkah yang lebih dari sekadar gimik. Publik membutuhkan pemimpin dengan gagasan otentik.

“Para bakal capres sebaiknya menunjukkan orisinalitas gagasan dan visi mereka serta program-program yang lebih (difokuskan) soal apa yang akan dilanjutkan atau dikembangkan (dari pemerintahan Jokowi),” kata Arya. ●







“Saya berharap ke depan wapres tidak hanya jadi vote getter. Sudah menang tapi enggak ngapa-ngapain, repot juga”

*Philips J Vermonte*

# INFO PILPRES

Minggu IV • Juli 2023

3

## BANYAK SYARAT MILIH CAWAPRES

**Peta politik jelang pemilihan presiden 2024 mendatang masih dinamis. Hingga kini, partai pengusung maupun tiga calon presiden yang digadang maju dalam pilpres belum menetapkan figur calon wakil presiden yang akan diusung.**

**C**apres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, menyebut, sosok yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 harus memenuhi dua syarat. Pertama harus memiliki visi yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan. Kedua harus memiliki semangat yang sama dalam menjalankan konstitusi dan undang-undang.

Ganjar berkeyakinan kesamaan pandangan akan membuat kerja-kerja presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pembangunan menjadi lebih mudah. Di sisi lain, meski telah memiliki kriteria, Ganjar mengatakan hingga kini belum ada kesepakatan siapa yang akan mendampinginya maju di Pilpres 2024. Komunikasi di internal tim kemenangan masih cair dalam menggodok sosok cawapres.

Menurut Ganjar siapapun yang akan menjadi cawapres nantinya hal yang terpenting adalah melakukan percepatan pembangunan. Apalagi, sebelumnya Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia membutuhkan waktu kurang lebih 13 tahun ke depan untuk mengejar pertumbuhan.

Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, menambah satu kriteria baru dalam memilih cawapres untuk menghadapi Pilpres 2024. Kriteria baru itu muncul seiring dengan dinamika politik yang terjadi menjelang pemilu.

Penambahan kriteria baru menambah daftar lima kriteria cawapres yang sebelumnya telah diumumkan Anies. Ia menyebut kriteria tambahan itu adalah sosok yang tidak bermasalah.

Anies menjelaskan, tidak bermasalah menjadi kriteria paling awal atau nomor nol dari lima kriteria sebelumnya. Menurutnya, permasalahan yang dimiliki seseorang dapat dengan mudah menyandang karir politik seseorang dewasa ini.

Sebelumnya, Anies telah mengumumkan lima kriteria cawapres yang ia cari. Punya kontribusi dalam kemenangan Pilpres 2024, bisa membantu mensolidkan koalisi, bisa membuat kerja sama di pemerinta-

han lebih efektif, memiliki visi yang sama, dan memiliki chemistry yang baik agar dapat menjadi dwi tunggal.

Di luar lima kriteria yang telah diumumkan Anies juga menambahkan satu kriteria baru atau nomor keenam, yakni orang dewasa dan matang. Anies menjelaskan orang yang telah dewasa umumnya tidak memasukkan emosi pada setiap keputusannya.

Sementara, capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, punya kriteria sendiri dalam memilih cawapres. Pada akhir April 2023, ia mengungkapkan mencari cawapres yang memiliki dedikasi kepada rakyat.

Selain itu, Prabowo menambahkan sejumlah kriteria berkaitan dengan semangat kebangsaan, harus komitmen kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Persatuan.

Sementara itu, syarat lain dari cawapres yang diinginkan Prabowo adalah memiliki kredibilitas dan integritas. Prabowo kemudian mempertimbangkan elektabilitas para tokoh yang bakal dipilih untuk jadi cawapresnya nanti.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai sosok cawapres menjadi lebih strategis menyongsong Pilpres 2024 lantaran belum ada calon presiden yang menang mutlak dalam survei elektabilitas.

Berdasarkan survei enam bulan terakhir, posisi teratas masih diisi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto secara bergantian dengan elektabilitas di kisaran 33 persen. Anies Baswedan yang berada di posisi ketiga, menurut Burhanuddin, masih memiliki peluang untuk mengejar.

“Peran cawapres

meskipun kecil jadi krusial. Cawapres lebih penting secara elektoral peranannya ketimbang peranan Pak Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019,” kata Burhanuddin dalam Indonesia Data and Economic Conference Katadata 2023, di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juli 2023.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial UII, Philips J Vermonte, mengamini perkataan Burhanuddin. Ia berharap posisi wakil presiden tak sekadar sebagai vote getter.

“Saya berharap ke depan wapres tidak hanya jadi vote getter. Sudah menang tapi enggak ngapa-ngapain, repot juga,” katanya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai para capres saat ini tidak memasukkan salah satu kriteria penting dalam cawapres mereka yakni persetujuan masing-masing koalisi partai politik. Selain itu, Adi menilai kriteria lain yang tidak disebutkan kandidat capres adalah faktor elektabilitas.

“Dua kriteria ini yang paling taktis, pragmatis, dan politis. Baru kemudian ada kriteria-kriteria lain yang disebutkan pada calon belum lama ini,” kata Adi, Jumat, 21 Juli 2023.

Adi berpendapat kriteria yang disebutkan masing-masing bakal capres adalah syarat ideal yang harus dimiliki bakal cawapres. Walau demikian, kriteria tersebut tidak bisa mendahului persetujuan partai politik dan elektabilitas.

Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, mengatakan Anies menginginkan pendamping yang sadar akan posisinya dalam pemerintahan jika terpilih.

“Artinya, sudah tahu kapasitas

wakil presiden itu bagaimana dan kapan saatnya bersinergi dengan presiden,” kata Jati.

Jati berpendapat kriteria tersebut mengedepankan kepentingan pemerintahan daripada kepentingan personal. Walau demikian, Jati tidak mau menyebutkan nama yang menurutnya cocok dengan kriteria tersebut.

Sementara itu, ia menafsirkan kriteria tidak memiliki masalah seperti diungkap Anies sebagai figur yang tidak memiliki dosa-dosa politik. Maknanya, figur tersebut tidak memiliki rekam jejak terlibat kegiatan korupsi, kolusi, nepotisme, atau hal-hal yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

Jati menjelaskan kriteria yang dipaparkan Ganjar sebagai figur yang dapat berperan sebagai administrator pemerintahan. Pada akhirnya, Ganjar diprediksi mengambil figur yang dapat menjaga konsolidasi internal pemerintahan.

“Dalam bayangan saya, mungkin Pak Ganjar fokus ke eksternal, terus wakil yang diinginkannya lebih ke internal,” katanya.

Jati juga menduga Ganjar telah mengerucutkan pilihan cawapres yang diinginkannya. Sedangkan, Anies masih memberikan pandangan umum terkait calon pendampingnya pada 2024.

Akan tetapi, Jati menekankan proses pemilihan Bacawapres untuk Pesta Demokrasi 2024 masih dinamis sejauh ini. Oleh karena itu, ia menilai kriteria yang disampaikan oleh Ganjar dan Anies hanya menjadi panduan bagi partai politik pendukung.

“Itu menjadi semacam panduan untuk menilai dan mengevaluasi figur-figur mana yang dikira tepat untuk posisi itu,” kata Jati. ●





“Makanya haqqu yakin  
siapapun yang meminang  
Erick Thohir dia menang  
di Pilpres 2024”

*Yandri Susanto*



# ERICK THOHIR JADI CAWAPRES SIAPAPUN CAPRESNYA PASTI MENANG

**Menteri BUMN, Erick Thohir, diyakini dapat memberikan daya ungkit yang signifikan bagi siapapun calon presiden (capres) yang memilihnya sebagai pasangan calon wakil presiden (cawapres) saat maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.**

Capres yang memilih Erick Thohir sebagai cawapres akan mendapatkan berkah. Pasalnya, Erick Thohir dapat mendongkrak selisih perolehan suaranya setidaknya 4 persen di atas capres yang tidak memilihnya sebagai pasangan.

Hal itu diungkapkan oleh Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam pemaparan Survei Nasional Indikator tentang Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Elektoral Jelang 2024 di Mata Generasi Muda di Jakarta, Minggu, 23 Juli 2023.

Hasil survei tersebut mengungkapkan, dalam simulasi 3 pasangan capres dan cawapres, ketika Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Erick Thohir, mereka mendapat dukungan 37,7 persen. Mereka unggul dibandingkan pasangan Prabowo Subianto dengan Airlangga Hartarto sebanyak 33,2 persen atau selisih 400 basis poin.

Demikian juga jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir, maka akan meraih pemilihan sebanyak 37 persen, atau lebih unggul jika melawan pasangan Ganjar Pranowo dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nazarudin Umar.

“Dalam simulasi tiga nama, Erick Thohir memberikan daya ungkit. Besarnya sekitar 4 persen. Masih tipis, namun dalam persaingan yang sungguh ketat saat ini, angka 4 persen itu adalah sangat penting,” ujar Burhanuddin.

Saat ditanya tentang faktor yang menjadikan Erick Thohir begitu kuat memberi daya ungkit, Burhanuddin mengatakan, salah satu alasannya adalah sepak bola. Erick memperoleh dorongan dari pemilih yang menyatakan puas atas kinerjanya sebagai ketua umum PSSI.

Pemilih juga mengapresiasi atas segala usaha Erick untuk mengantarkan sepak bola Indonesia meraih prestasi internasional, seperti meraih emas pada SEA Games 2023. Selain itu, Erick juga sukses memberikan gebrakan dengan membawa juara dunia 2022, Argentina, ke Indonesia.

Dari responden yang tahu bahwa

Erick sudah menjadi Ketua Umum PSSI, Burhanuddin mengatakan, sebanyak 92 persen menyatakan puas atas hasil kerjanya di PSSI. Ini terbukti, sebelum menjadi Ketua Umum PSSI, Erick selalu berada di posisi 5 cawapres. Sekarang sudah unggul di posisi teratas.

Publik yang mengetahui Erick jadi Ketua Umum PSSI naik dari 43,2 persen pada April ke 53,5 persen pada Juni. Mereka juga puas atas kinerja Erick. Sebanyak 7,9 persen yang sangat puas pada April, naik jadi 19,1 persen pada Juni. Pun 65,7 persen yang cukup puas pada April, naik jadi 73,6 persen pada Juni. Angka mereka yang kurang puas atau tidak puas turun.

Dari 14,7 persen yang kurang puas pada April, turun menjadi 4,7 persen pada Juni. Sedangkan, dari 2,1 persen yang tidak puas sama sekali atas kinerja Erick Thohir pada April, turun menjadi 0,3 persen pada Juni.

“Kepuasannya tinggi, ada peningkatan tajam, April sekitar 73 persen yang sangat atau cukup puas, Juni ketika survei ini dilakukan kepuasan capai 92,6 persen. Jadi tinggi sekali kepuasan Erick sebagai Ketua Umum PSSI,” kata Burhanuddin.

Ketua DPP PAN, Intan Fauzi, menanggapi nama Erick Thohir yang belakangan mengemuka sebagai kandidat cawapres. Intan menyimpulkan

hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan Erick Thohir dalam posisi teratas.

“Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan jika Erick Thohir digandeng sebagai cawapres akan menentukan kemenangan, memberikan penegasan bahwa keputusan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam mendukung Erick Thohir sudah tepat,” kata Intan, Selasa, 25 Juli 2024.

Intan menyebut dalam hasil survei Indikator Politik terbaru, Erick Thohir mendapat suara besar jika dipasangkan dengan capres manapun. Ia menilai Erick mampu menentukan kemenangan pada di Pemilu 2024.

“Hasil survei ini sekaligus memberikan pilihan bagi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Siapa di antara keduanya yang mau memenangkan kontestasi Pilpres 2024, maka sepatutnya menggandeng Erick Thohir sebagai cawapresnya. Kalau mau menang berjalan bersama Erick Thohir,” ujar anggota Komisi VI DPR ini.

Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) ini menambahkan, dengan asumsi waktu yang semakin dekat, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bisa mempertimbangkan baik-baik nama Erick Thohir. Menurutnya, penentuan cawapres semakin cepat akan jauh lebih baik.

“Semakin cepat me-

mutuskan juga menurut kami akan sangat baik. Karena dengan begitu bisa mempersiapkan kemenangan di lapangan. Paling tidak nantinya bisa lebih meningkatkan hati calon pemilih dan sisi lain memberikan kepastian bagi banyak sektor,” kata dia.

Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, mengungkapkan, Erick Thohir yang didorong partainya menjadi cawapres sudah condong ke satu bakal capres. Namun, hal tersebut belum menjadi keputusan resmi partai.

PAN sendiri masih menawarkan Erick sebagai cawapres kepada PDIP dan Partai Gerindra. Namun ia enggan mengungkapkan, Erick sudah condong ke Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

“Di antara dua ini kecenderungannya sudah agak ada perbedaan antara Pak Ganjar dan Prabowo. Kemarin saya bilang sama kuat, sekarang sudah mulai ada perbedaan, sinyal itu sudah menguat ke salah satu capres,” ujar Yandri.

PAN sendiri sudah memiliki simulasi dan perhitungan jika Erick berpasangan dengan Prabowo atau Ganjar. Ia percaya diri, siapapun yang memilih Erick sebagai calon RI 2 akan memenangkan Pilpres 2024.

Kepercayaan dirinya hadir dari berbagai hasil lembaga survei yang menempatkan elektabilitas Erick sebagai cawapres adalah yang tertinggi. Di samping, Menteri BUMN itu yang memiliki tingkat keterkenalan yang sangat tinggi di publik.

“Artinya kerja-kerja Erick Thohir di masyarakat sekarang direspons baik oleh publik dan publik tahu Pak Erick Thohir rencana ikut pilpres. Maka diterjemahkan melalui survei, makanya haqqu yakin siapapun yang meminang Erick Thohir dia menang di Pilpres 2024,” ujar Yandri.

Di samping itu, dia juga menanggapi Prabowo yang berada satu mobil dengan Erick, Presiden Joko Widodo, dan Ibu Negara Iriana. Menurutnya, itu kode keras Presiden Jokowi yang merestui keduanya berpasangan pada Pilpres 2024. “Itu pasangan yang pas, jadi Pak Jokowi sama Ibu, Pak Prabowo sama Erick sama-sama menternya Pak Jokowi. Tapi menurut saya, itu kode keras untuk menghadapi kontestasi pilpres,” ujar Wakil Ketua MPR itu. ●







“Sandiaga Uno memiliki modal yang cukup untuk mengangkat elektabilitas para caleg PPP”

**Achmad Baidowi**

INFO  
**CALEG**

Minggu IV • Juli 2023

5

# SATUKAN KADER HIJAUKAN JAKARTA

**Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, menginstruksikan seluruh calon legislatif (caleg) membentuk tim pemenangan untuk mengoptimalkan perolehan suara di Pemilu 2024.**

**H**al itu disampaikan Mardiono saat menghadiri pengukuhan dan bimbingan teknis relawan pemenangan salah satu caleg DPR RI PPP, Mayjen TNI (Purn) Neno Hamriono, di Hotel Hariston, Penjaringan, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023.

Mardiono menyampaikan, kehadirannya pada acara itu sebagai bentuk dukungan karena kegiatan tersebut sesuai dengan program kerja pemenangan pemilu partai berlandaskan Kabah itu.

“Alhamdulillah ini memang sudah sesuai dengan program kerja pemenangan PPP, di mana PPP mencanangkan seluruh caleg membentuk tim relawan untuk menyisir bersama-sama dengan tim pemenangan yang telah ada di struktur,” kata Mardiono.

Mardiono menyebutkan, tim relawan nantinya akan bekerja sama dengan struktur partai setelah diberi pembekalan, seperti visi dan misi PPP, pengenalan terha-

dap caleg, sekaligus visi dan misi caleg.

“Nantinya tim relawan akan bekerja sama dengan struktur partai. Insya Allah Pak Neno yang berada di Dapil 3 (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) bisa berkolaborasi dengan para calon lainnya untuk mendapatkan kursi. Mudah-mudahan PPP bersama struktur dan relawan masih punya kesempatan menghijaukan Jakarta jelang Pemilu 2024,” terangnya.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, berharap bergabungnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, akan memberikan efek elektoral bagi para caleg PPP. Awiek menyatakan bergabungnya Sandiaga Uno tak hanya karena dia akan dijadikan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diajukan PPP ke PDIP.

Kedua partai sebelumnya telah sepakat untuk sama-sama mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres.

Dia menyatakan berga-



bungnya ke Sandiaga Uno merupakan salah satu upaya partainya untuk meningkatkan elektabilitas para caleg PPP. Tujuannya adalah agar PPP bisa mendapatkan lebih banyak kursi di DPR periode 2024-2029.

“Karena itulah, jika ada yang berasumsi bahwa bergabungnya Pak Sandi ke PPP hanya demi tiket cawapres merupakan pandangan yang dangkal,” kata Awiek.

Menurut Awiek, Sandiaga Uno memiliki rekam jejak yang dinilai mampu mengangkat elektabilitas. Sandiaga Uno juga memiliki modal yang cukup untuk mengangkat elektabilitas para caleg PPP. Pasalnya, pria berusia 53 tahun itu memiliki rekam jejak yang baik.

“Pernah menjabat Wagub DKI Jakarta, menjadi calon wakil presiden 2019 dan sekarang menjabat Menteri Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata,” kata Awiek. ●

## Wartawan Nyaleg Wajib Mundur

**D**ewan Pers mengingatkan wartawan yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) mengundurkan diri dari perusahaan tempat bekerja demi menjaga independensi jurnalis dan keberimbangan berita.

Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, mengatakan hal itu berdasarkan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/XII/2022 tentang Kemerdekaan Pers yang Bertanggung Jawab untuk Pemilu 2024 yang Berkualitas. Dalam surat edaran tersebut, wartawan yang terlibat dalam politik praktis harus mengundurkan diri secara permanen atau sementara.

“Teman-teman wartawan yang terlibat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, calon kepala daerah dan lainnya, kami dari Dewan Pers meminta untuk segera nonaktif atau mengundurkan diri, sebelum KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT),” kata Atmaji di Ambon, Senin, 24 Juli 2023.

Dia menjelaskan, aturan tersebut sebagai upaya untuk menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. Sehingga akan terjamin kemerdekaan pers guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi

yang netral, adil dan berkualitas

Menurutnya, urusan menjadi caleg adalah hak politik setiap warga negara yang telah diatur dalam undang-undang.

“Dewan Pers tidak melarang bagi wartawan siapapun yang ingin menjadi caleg, tetapi harus mengundurkan diri jika masih menjadi bagian ruang redaksi,” katanya.

Atmaji mengakui jika tidak mengundurkan diri dari profesi wartawan tentu akan mengganggu sikap independensi dan netralitas pers.

“Menjadi Caleg itu hak politik mereka untuk menyampaikan aspirasi dan itu sudah diatur dalam undang-undang, tetapi supaya pers independen dan netral, sebaiknya mereka mundur,” katanya.

Sebel-

umnya, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari, juga menyatakan pengurus dan anggota

PWI yang ingin menjadi caleg dalam Pemilu 2024 harus mengundurkan diri dari organisasi kewartawan itu.

“Wartawan yang tergabung dalam PWI dibolehkan untuk jadi caleg atau tim sukses, tapi sesuai AD/PRT PWI harus mengundurkan diri,” kata Atal.

Atal menjelaskan, aturan tersebut sebagai upaya untuk menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat.

Dengan begitu maka akan terjaga ke-

merdekaan pers guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang netral, adil dan berkualitas.

“Jika tidak mengundurkan diri, maka ditakutkan akan berpengaruh pada netralitas wartawan tersebut. Oleh sebab itu, PWI dan Dewan Pers mengimbau wartawan untuk melepas profesinya sebagai wartawan atau non aktif,” katanya.

Atal juga mengingatkan, insan pers untuk dapat mengawal pembangunan sesuai dengan fungsi dan tugas wartawan. “Wartawan jangan salah dalam memaknai kemerdekaan pers, sehingga berita yang dihasilkan itu tidak hanya tentang kasus semata, namun menjaga kemitraan itu juga penting,” ujarnya.

Atal menambahkan, pena wartawan harus tetap diasah. Artinya, setiap wartawan harus rutin mengeluarkan produk jurnalistik, sehingga dikenal, diakui bahkan dipercaya aktivitas dirinya sebagai wartawan.

“Kita harus mengawal dengan pena kita, dan kita juga harus menjaga netralitas sebagai wartawan. Saya kenal banyak tokoh nasional, namun hingga sekarang saya tidak nomor handphone mereka. Hal ini saya lakukan sebagai wujud dalam menjaga netralitas,” ujar Atal. ●







# INFO PARTAI

Minggu IV • Juli 2023

“Ketua Umum PBNU secara tegas menyatakan jika warga NU tidak haram memilih PAN”

*Dedi Kurnia Syah*



## PAN MAKIN DEKAT NAHDLIYIN

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai politik primadona warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin pada Pemilu 2024. Hal itu terlihat dari banyaknya tokoh NU yang bergabung menjadi kader PAN.

Sejumlah tokoh NU memang banyak yang tergabung di dalam PAN. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Gus Syaiful Nuri (Mas Ipung) dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Gus Ahmad Abdul Qodir dari Pondok Pesantren Syaikh Abdul Qodir Jailani.

Terlebih, beberapa waktu lalu Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mempersilahkan warga Nahdliyin untuk memilih PAN. Ucapan tersebut dinilai merupakan dukungan kepada partai besutan Zulkifli Hasan tersebut.

“Kalau kita baca secara sosiologis, Nahdliyin itu tergantung kiai, sami’na wa atho’na ke kiai. Walaupun dalam konteks politik agak cair, tetapi itu kan perlu dirangkul,” kata pengamat Politik UIN Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan.

“Tergantung PAN sekarang bisa menangkap sinyal itu (dukungan tidak langsung) secara baik. (Harus) bisa masuk ke kantong NU,” kata Bakir.

Bakir menyebut, meski mendapat dukungan dari Ketum PBNU, PAN tetap harus bekerja secara optimal untuk memanfaatkannya. Salah satunya dengan memperkenalkan para calon anggota legislatif (Caleg) yang diusungnya pada Pemilu 2024.

“Kalau dilihat PAN sepertinya banyak menarik tokoh-tokoh, public figure yang dianggap punya popularitas. Itu tidak menjamin, tergantung kerja partai,” ungkapnya.

Menurut pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, PAN berpeluang besar meraih dukungan dari kalangan NU karena memiliki gagasan dan ide yang dapat meyakinkan basis pemilih muslim. Apalagi, preferensi politik warga NU sangat beragam. Oleh sebab itu, PAN dapat hadir dengan menawarkan ide serta gagasan yang disukai NU.

“Biasanya orang tetap akan memanfaatkan politik gagasan dan ide yang bisa meyakinkan kelompok-kelompok kelas menengah. (Mengambil hati) menengah Nahdliyin urban (PAN) punya peluang,” kata Surokim, Rabu, 28 Juni 2023.

Selain itu, faktor kedekatan NU dan PAN akhir-akhir ini diyakini akan membuat warga Nahdliyin memberikan suaranya kepada PAN. Hal itu terlihat dari banyaknya tokoh-tokoh NU yang me-



milih bergabung dengan PAN.

Tak hanya itu, pada Februari 2023, PAN juga menggelar acara simposium 1 abad NU di Surabaya. Hal tersebut semakin memperlihatkan hubungan PAN dan NU semakin erat.

“Mereka mengadakan peringatan 1 abad NU dan lain-lain. (Itu) bagian dari cara

merebut hati Nahdliyin,” ungkap Surokim.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai PAN berpeluang menyerobot suara warga NU pada Pemilu 2024.

“PAN saat ini alami perubahan komunikasi yang signifikan, Zulhas berhasil membawa PAN tidak saja lekat dengan Muhammadiyah, tetapi lebih dari itu, misalnya dengan NU,” kata Dedi, Senin, 10 Juli 2023.

Dedi juga menambahkan, aliran suara warga NU juga diafirmasi oleh komentar Ketua Umum PBNU yang mengatakan warga Nahdliyin diperbolehkan memilih PAN pada Pemilu 2024.

“Bahkan, Ketua Umum PBNU secara tegas menyatakan jika warga NU tidak haram memilih PAN, justru ter-

balik dengan statemen pada PKB,” jelasnya.

Maka bergabungnya tokoh dari kalangan pesantren menambah optimisme PAN menyongsong Pemilu 2024. PAN pun meyakini dapat mengirimkan wakilnya ke DPR melalui tokoh-tokoh santri NU tersebut.

“Tentu ini kabar baik karena ada

semacam perluasan target pemilih PAN,” ujarnya.

Dukungan dari kalangan NU juga semakin menambah daya elektoral PAN. Dengan dukungan tersebut elektabilitas PAN konsisten meningkat.

Menurut data survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode Juni 2023, elektabilitas PAN tercatat mengalami kenaikan signifikan hingga 5 persen. Posisi PAN bahkan mengungguli PKS, PPP, serta Perindo.

Dedi mengatakan, PAN saat ini telah mengalami kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan. Hal itu dilandasi dari banyaknya dukungan termasuk dari Nahdliyin.

“Ada beragam dukungan untuk partai PAN sampai elit masyarakat, seperti Ketua Umum PBNU. Banyak para tokoh penting NU dukung PAN yang menghasilkan daya elektoral,” terang Dedi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, menyebut melihat potensi pesantren sangat besar, lebih dari sekadar tempat untuk belajar ilmu agama, namun bisa membantu secara ekonomi kepada sesama.

Oleh karena itu, PAN berkomitmen kuat dalam memberdayakan pesantren demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa ke depan.

“Kebanyakan dari mereka beralasan, susah pak, kami mau ngaji bagaimana, mau makan saja susah, jadi kalau diberdayakan ekonominya, InsyaAllah menyelesaikan kebodohan dan kemiskinan,” ujar Yandri.

Salah satu upaya PAN adalah dengan menggandeng Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN). PAN melihat, HPN memiliki jaringan yang luas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan pesantren.

“Melalui HPN ini saya berharap bisa benar-benar diseriisi, karena yang saya sampaikan tadi ke fakiran itu akan mendekati kekafiran,” sebutnya.

Selain itu, PAN juga melihat peran pesantren sangat besar dalam mengontrol sosial. Pesantren dinilai bisa memberi solusi dari berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Misalnya maraknya kejahatan dan kenakalan yang kerap muncul di tengah-tengah anak muda seperti narkoba hingga minuman keras. Pesantren bisa turut memberikan solusi konkret untuk mengatasi itu semua.

“Karena di tengah hiruk pikuk kegalauan masyarakat, seperti maraknya narkoba, minuman keras, tawuran, dan penyakit sosial lainnya, pesantren ikut memberi solusi,” papar Yandri. ●







“Kita tidak sedang memilih Superman atau Iron Man, tetapi kita mencari pemimpin untuk semua umat”

*Anis Matta*

# INFO PARTAI

Minggu IV • Juli 2023

7

## POPULASI PEMILIH MAYORITAS SUARA PARTAI ISLAM MINORITAS

**Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Anis Matta, menegaskan, agenda keumatan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 harus disesuaikan dengan konteks geopolitik. Pasalnya, saat ini masyarakat sedang menghadapi situasi yang sangat kacau.**

“Dunia kita ini benar-benar berantakan, sangat kacau, di bawah ancaman perang” kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa, 25 Juli 2023.

Anis Matta mengatakan, dominasi Amerika Serikat sebagai kekuatan global pelan-pelan mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan konflik supremasi, serta memicu krisis fundamantal seperti ekonomi, pangan dan energi.

“Kita tidak sedang menakut-nakuti, tapi kita bicara tentang realitas. Situasi geopolitik ini akan mengubah seluruh pertarungan global, sementara di tengah situasi yang sangat kacau ini, ada Pilpres 2024. Lalu, bagaimana kita menghadapinya,” ujar Anis Matta.

Menurut Anis Matta, Islam telah mengajarkan mengenai pentingnya memahami situasi geopolitik, yakni ketika ada perintah turunnya wahyu dalam Al Qur'an, Surat Ar-Rum pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW.

“Jumlah Umat Islam saat itu masih puluhan dan coba bayangkan Rasulullah SAW tiba-tiba mendapatkan wahyu tentang bangsa lain yang sedang berkuasa pada waktu itu, yaitu bangsa Romawi,” katanya.

Anis Matta mengatakan, Allah SWT telah mengajarkan pertarungan dua bangsa besar saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Dalam perjalanan sejarah, Umat Islam akan bertemu dengan bangsa namanya Romawi.

“Dan kira-kira 6 tahun setelah turunnya Surat Ar-Rum ini, Umat Islam bertemu dalam perang dengan Bangsa Romawi. Artinya ada pelajaran akidah dan iman dalam pelajaran tentang geopolitik,” katanya.

Menurut Anis, Allah SWT ingin menyampaikan pesan yang sangat kuat tentang pelajaran hidup dalam berpolitik kepada Umat Islam.

“Nah, kalau sekarang kita bawa dalam konteks geopolitik saat ini, tentu menjadi tantangan bagi seluruh bangsa. Karena setiap bangsa akan berusaha bisa survive,” ujarnya.

Karena itu, disinilah pentingnya agenda keumatan diperjuangkan agar pemimpin yang dihasilkan dapat memahami situasi

geopolitik dan mampu menjawab tantangan global.

“Tetapi secara politik, Umat Islam saat ini masih menghadapi masalah mindset, masalah narasi, dan masalah kepemimpinan. Inilah kendala kita dalam menetapkan agenda keumatan,” katanya.

Padaحال Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia secara populasi. Sementara, dalam konteks agama adalah negara dengan jumlah Umat Islam terbesar di dunia.

“Jadi Umat Islam di Indonesia itu punya masalah mindset. Mayoritas secara populasi, tetapi minoritas dalam mindsetnya, hanya mewakili kelompoknya. Jadi ini jawaban, kenapa partai-partai Islam itu selalu menjalankan politik identitas, karena dia ingin mewakili kelompoknya,” ujarnya.

“Ada kelompok Islam kota, kelompok Islam tradisional, kelompok Islam modern dan lain-lain. Dia kan mayoritas, tapi berpikirnya minoritas. Semangatnya hanya mewakili kelompok, bukan mewakili Indonesia,” imbuhnya.

Anis Matta berharap Umat Islam belajar dari pelajaran Piagam Madinah, di mana Rasulullah SAW menganggap semua penduduk di Madinah sebagai Umat, termasuk orang-orang Yahudi, karena memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal kewarganegaraan.

“Mumpung kita dalam suasana hijrah, sekarang kita harus hijrah dari mindset minoritas kepada mindset mayoritas. Itulah pelajaran yang kita dapat dari Rasulullah SAW saat hijrah dari Makkah ke Madinah,” katanya.

Dengan mindset mayoritas itu, lanjutnya, Islam akhirnya menguasai dunia, ber-

lanjut kepada kekuasaan Bani Umayyah, Abbasiyah hingga Utsmaniyah.

“Jadi sekarang sudah saatnya Umat Islam ini hijrah dari mindset minoritas kepada mindset mayoritas. Dari semangat outsider sebagai orang luar menjadi Insider, orang dalam. Kita harus mengelola negara ini, karena kitalah yang mayoritas,” katanya.

Maknanya adalah Umat Islam harus menjalankan politik populasi seluruh bang-

sa, baik yang muslim maupun non-muslim seperti semangat yang ada dalam Piagam Madinah.

“Umat Islam sekarang tidak ada yang membawa solusi bagi masalah bersama mengenai berbagai isu. Berpikirnya selalu mewakili kelompok, sehingga tidak ada yang membawa narasi Islam secara konseptual. Semua orang membawa Islam hanya sebagai simbol saja,” katanya.

Tetapi, krisis narasi ini sebenarnya, terjadi pada kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah itu muslimnya, apakah yang sekuler, yang kanan, tengah dan kiri semua memang mengalami krisis narasi.

“Jadi ketika kita bicara siapa pemimpin kita nanti, kita selalu dihadapkan pada persoalan narasi dan kepemimpinan. Inilah yang menyebabkan kenapa umat Islam mayoritas di sini, tapi Partai Islam selalu kecil perolehan suaranya, tidak lebih dari 20 persen karena mereka tidak mau menawarkan narasi,” ucapnya.

Akibatnya, tidak ada calon pemimpin yang didukung penuh dari kelompok kanan. Oleh karena itu, Umat Islam harus melakukan hijrah mindset, baru kemudian menawarkan narasi. Dengan narasi itu, maka akan ada calon pemimpin yang membawa politik populasi, tidak lagi mewakili kelompok lagi.

“Kalau kita membawa semangat Indonesia, maka kita harus membawa politik populasi. Kita harus membawa Islam sebagai jawaban, meskipun kita tidak akan menemukan pemimpin yang sempurna.

Kita tidak sedang memilih Superman atau Iron Man, tetapi kita mencari pemimpin untuk semua umat,” pungkas Anis Matta.●





“TNI tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana Kampanye”

*Laksda Julius Widjojono*



# PRAJURIT TNI SUDAH PASTI NETRAL

**Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, menegaskan prajurit TNI harus netral dalam Pemilu 2024. Dia berharap pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman dan lancar.**

“Untuk TNI tetap netral, kuncinya adalah harus netral supaya pemilu ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,” kata Yudo Margono, Senin, 24 Juli 2023.

Yudo mengaitkan bentuk nyata netralitas prajurit TNI dalam Pemilu 2024 dengan baliho bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo, di Kabupaten Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dia menyebut pencopotan baliho itu bentuk netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

“Saya sudah sampaikan ke seluruh jajaran, mungkin nanti semua rekan semua sudah melihat banner yang dipasang, untuk TNI tetap netral,” tutur dia.

Yudo sebelumnya buka suara soal pencopotan baliho Ganjar Pranowo di Muara Teweh yang menjadi perbincangan dan membantah narasi ada pemaksaan pencopotan dari kejadian tersebut. Baliho Ganjar tersebut diketahui dipasang di lahan milik Kodim 1013 Muara Teweh. Karena faktor netralitas, baliho tersebut harus diturunkan.

“Jadi begini, ceritanya mungkin seolah-olah dicopot, dipaksa, jadi tidak. Sesuai yang saya sampaikan tentang netralitas TNI sudah sampaikan pada jajaran, bahkan dipasang di mana-mana, juga tidak memasang tanda-tanda di area TNI,” kata Yudo.

Yudo juga mengungkapkan melalui Dandim 1013 Letkol Inf Edi Purwoko, baliho itu diturunkan sesuai mekanisme dan dikoordinasikan dengan pihak pemasangan.

“Kemarin dari Dandim Muara Teweh, sudah dikoordinasikan dengan pemasangan, per-

wakilan partai, Satpol PP juga dengan Pak Bupati (Barito Utara) sudah disampaikan, dilepas disaksikan mereka, bukan dicopot, kita tetap gunakan aturan,” ungkapnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksda Julius Widjojono, menegaskan, pencopotan tersebut demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Menurutnya, jauh sebelum memasuki tahun politik, Panglima TNI telah memberikan pengarahannya dan penekanan kepada prajurit TNI untuk selalu netral pada Pemilu 2024.

“TNI tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana Kampanye,” kata Julius.

Pada Mei lalu, dalam keterangan yang diunggah Dinas Penerangan TNI, Yudo Margono menegaskan jajarannya agar menjaga netralitas jelang Pemilu 2024. Yudo juga menegaskan agar jajarannya tak memberikan ruang bagi kampanye parpol. Termasuk, memberi hasutan kepada sanak saudara untuk menentukan siapa paslon maupun parpol yang akan dipilih.

Pihaknya membeberkan lima poin penting yang harus dijaga para prajurit TNI dari ketiga Matra.

Pertama, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik mana pun beserta paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

Ketiga, keluarga prajurit

TNI yang memiliki hak pilih (hak individu sebagai warga negara) dilarang memberikan dalam menentukan hak pilih.

Keempat, tidak memberikan tanggapan, komentar, dan meng-upload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.

Kelima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik beserta paslon yang diusung.

Sementara itu, Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjen TNI Mochamad Syaifei, juga menegaskan prajurit TNI harus netral dalam Pemilu 2024. Dia mengatakan hal itu arahan dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

“Yang pertama saya perlu garis bawahi di sini, sesuai dengan arahan Bapak Panglima bahwa TNI harus netral dalam pemilu itu sangat penting yang harus disampaikan ke masyarakat,” kata Syaifei.

TNI yang merupakan salah satu kom-

ponen dalam menciptakan pemilu damai mempunyai peran besar dalam menjaga stabilitas keamanan negara Indonesia. Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah banyak membuka komunikasi dengan masyarakat dan ormas di berbagai lintas wilayah di Indonesia.

Syaifei menilai edukasi kepada masyarakat tentang netralitas TNI penting dalam menciptakan pemilu yang damai. Selain itu, perlu juga menjaga konsoliditas antarindividu dan ormas untuk mencegah merebaknya berita-berita bohong (hoax).

“Kami juga mengimbau dan mengedukasi kepada individu masyarakat dan ormas untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita hoax yang saat ini tengah beredar di media sosial dan media-media lainnya,” katanya.

Dia juga menyambut positif dukungan Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) terhadap TNI.

“Tentu hal semacam ini perlu kita sambut terbuka dan positif, karena dengan kolaborasi ini bisa membantu menyampaikan pesan kita ke masyarakat” ucapnya.

Ketua Umum Hipakad, Hariara Tambunan, mengatakan pihaknya siap membantu kinerja TNI dalam menciptakan pemilu yang damai.

Dia memerintahkan kepada seluruh jajarannya selalu siap siaga saat dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh TNI.

“Saya perintahkan kepada seluruh anggota, staf beserta jajaran Hipakad untuk senantiasa siaga standby 24 jam apabila dibutuhkan bantuan oleh TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, baik berupa tenaga dan pikiran, apapun itu bentuknya, sesuai dengan semboyan kita, satu jiwa satu korsa satu komando,” katanya. ●







“Jadi ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung”

*Tito Karnavian*

# INFO PEMILU

Minggu IV • Juli 2023

9

## PENJABAT KEPALA DAERAH JANGAN BIKIN RUWET

**Partai Persatuan Indonesia (Perindo) meminta Kementerian Dalam Negeri membuat aturan mengenai penjabat kepala daerah dalam menghadapi Pemilu 2024.**

**W**akil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, kepemimpinan penjabat kepala daerah yang hampir dua tahun dikhawatirkan justru melahirkan kerumitan-kerumitan baru. Pandangan ini disampaikan Ferry Kurnia merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta para penjabat kepala daerah harus bersikap netral dan menjaga keberlangsungan pemerintahan jelang Pemilu dan Pilkada 2024.

“Jangan sampai penjabat-penjabat kepala daerah ini justru menjadi sumber masalah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selama masa menjabat,” kata Ferry Kurnia, Senin, 24 Juli 2023.

Selama 2022-2023, ada 271 kepala daerah yang habis masa jabatannya dan akan digantikan oleh penjabat kepala daerah. Jumlah itu terdiri dari 24 gubernur, 56 wali kota, dan 191 bupati. Para penjabat kepala daerah mengisi kekosongan kekuasaan hingga ada kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024.

Ferry yang merupakan bakal caleg DPR dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat I itu, menuturkan kehadiran penjabat kepala daerah di masa lalu tidak jarang melahirkan kerumitan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, meskipun kehadiran mereka bersifat sementara dengan masa jabatan singkat.

Dia mengambil contoh kasus menjelang Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur pada 2020. Saat itu, terjadi polemik pengantulan Surat Keputusan (SK) pengangkatan caretaker kepala desa yang dianulir penjabat kepala daerah. Padahal, penjabat kepala daerah tidak memiliki wewenang untuk menganulir SK

yang diteken Bupati Abdul Mukti Keliobas.

Ferry menegaskan, apabila kehadiran penjabat kepala daerah dengan durasi

masa jabatan relatif pendek saja melahirkan komplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penunjukan lebih dari 200 kepala daerah selama dua tahun bukan tidak mungkin menimbulkan kerumitan yang lebih kompleks.

“Oleh karena itu, perlu ada aturan yang jelas mengenai penjabat kepala daerah ini, baik itu berkaitan dengan wewenang, perlindungan hukum, kualifikasi untuk menjadi pelaksana tugas maupun adanya saksi bagi pelaksana tugas yang menyalahgunakan wewenang,” ungkap Ferry.

Selain itu, kata Ferry, perlu ketegasan mengenai kelimpahan wewenang atribusi, delegasi atau mandat bagi kepala daerah. Juga memastikan untuk selalu bersikap netral dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di daerah masing-masing.

Ferry menegaskan, seorang penjabat kepala daerah tidak boleh menggunakan posisinya untuk mendukung atau menguntungkan kandidat tertentu. Hal tersebut untuk

memastikan bahwa seluruh calon peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil.

Selain itu, pada saat pemilihan umum berlangsung, penjabat kepala daerah harus memastikan bahwa mereka tidak ikut campur dalam kampanye politik atau menggunakan sumber daya pemerintahan untuk kepentingan tertentu.

“Mereka harus tetap fokus pada tugas-tugas administratif dan penyelenggaraan pemerintahan setempat dengan menjaga netralitas dan integritas,” ucapnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian, meminta penjabat kepala daerah harus bersikap netral dan menjaga keberlangsungan pemerintahan jelang Pemilu dan Pilkada 2024.

“Tidak ikut dalam politik praktis kemenangan siapa pun, khusus untuk teman-teman penjabat, karena rekan-rekan adalah birokrat,” kata Mendagri, Senin, 24 Juli 2023.

Dia menegaskan, keberadaan penjabat kepala daerah hanya untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan. Sebagai seorang birokrat, Mendagri menegaskan penjabat kepala daerah agar tidak berafiliasi dengan partai mana pun atau calon siapa pun.

“Karena sekali berafiliasi nanti akan menimbulkan kecemburuan lain dan akan menimbulkan kekisruhan politik. Jadi ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung,” jelas Tito.

Mendagri menjelaskan, sebagai negara demokrasi, pelaksanaan pemilu menjadi bagian penting bagi Indonesia. Pasalnya, Pemilu merupakan satu-satunya momentum bagi rakyat untuk terlibat penuh menentukan pemimpin, baik di tingkat pusat, daerah, maupun perwakilannya. ●

## Camat dan Lurah Harus Netral

**S**ekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, menegaskan camat dan lurah harus netral dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Apalagi, regulasi telah mengatur dengan jelas mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Karena aturannya sudah jelas, kita itu harus netral, tidak boleh berpihak, mana yang berpihak pun sudah dijelaskan, apa yang boleh dan tidak boleh, tinggal menjalankan aturannya di lapangan,” jelas Suhajar.

Meski begitu, Suhajar menyadari masih ada camat dan lurah yang belum mampu bekerja secara profesional dengan menjaga netralitasnya. Hal ini misalnya terjadi pada Pilkada Serentak 2020 yang masih diwarnai pelanggaran oleh camat dan lurah.

Berdasarkan data KASN, pelanggaran netralitas yang melibatkan camat dan lurah

beserta jajarannya pada Pilkada Serentak 2020 sebanyak 189 pelanggaran atau 11,9 persen. Jenis pelanggaran tersebut beragam dari mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, kampanye/sosialisasi di media sosial seperti posting/like/komentar, menghadiri deklarasi bakal calon, hingga menjadi peserta kampanye.

Lebih lanjut, Suhajar membeberkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga netralitas camat dan lurah. Pertama, camat dan lurah harus berintrospeksi diri karena regulasi sudah mengatur dengan jelas. Mereka harus memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga netralitas.

Kedua, mendorong partai politik agar tidak melibatkan ASN termasuk camat dan lurah dalam berpolitik. Ketiga, jajaran pengawas seperti Bawaslu, KASN, BKN, Kementerian PANRB, dan Kemendagri harus tegas dalam memberikan sanksi kepada camat maupun lurah yang melanggar.

“Peran KASN dan Kemendagri kita jaga ini dengan objektif menegakkan aturan ini yang bermuara pada sanksi, kita juga perlu pikirkan reward,” ujarnya.

Perlu juga memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat agar semakin cerdas dalam memilih calon pemimpin. Dengan begitu, masyarakat tidak akan memilih calon pemimpin yang melibatkan ASN untuk memperoleh kemenangannya.

Suhajar juga menekankan agar camat dan lurah tidak perlu khawatir bekerja secara profesional dengan menjaga netralitasnya. Berdasarkan pengalamannya, ASN

yang mampu terus bertahan di tengah dinamika gelombang politik, sebagian besar adalah yang bekerja secara profesional. Mereka, kata Suhajar, siklus kariernya akan naik dan stabil, berbeda dengan ASN yang mengabaikan netralitasnya yang cenderung kariernya akan tenggelam. ●





“Saya melihat kalau di Kamboja saja bisa, tentu di negeri kita yang juga sama-sama mempunyai teknologi seperti ini bisa dilakukan”

*Agung Laksono*



# KPU SEKARANG KURANG GARANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan regulasi baru, yakni Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Dalam beleid yang diundangkan pada 17 Juli 2023 itu, KPU melarang peserta pemilu melakukan ‘kampanye colongan’, namun tidak memuat ketentuan sanksi bagi yang melanggar.

Lewat Pasal 79 PKPU 15/2023, KPU memperbolehkan partai politik melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2024. Sosialisasi dan pendidikan politik itu bentuknya pemasangan bendera dan nomor urut partai serta pertemuan terbatas.

Masih dalam pasal yang sama, KPU melarang partai politik melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang memuat unsur ajakan. Selain itu, juga dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai menggunakan metode penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum maupun di media sosial di luar masa kampanye.

Larangan kampanye sebelum jadwal itu juga ditegaskan dalam Pasal 69 PKPU 15/2023. Kendati demikian, KPU tak memuat ketentuan sanksi dalam beleid tersebut.

Pasal 76 PKPU 15/2023 hanya menye-



butkan, “perbuatan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Komisioner KPU, August Mellaz, menjelaskan, pihaknya tak memuat ketentuan sanksi karena UU 7/2017 tentang Pemilu tak mengatur sanksi bagi pelaku yang curi start kampanye.

“Semua pelanggaran itu sanksinya mengacu ke ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kalau Pasal 279 (UU Pemilu) kan memang tidak mengatur sanksi (curi start kampanye). Masa kita bikin-bikin,” kata Mellaz Sabtu, 22 Juli 2023.

Kebijakan KPU tidak mengatur sanksi curi start kampanye ini berbeda dengan KPU periode sebelumnya. Dalam aturan kampanye Pemilu 2019, yakni PKPU 33/2018, KPU mengatur sanksi administratif bagi pelaku curi start kampanye.

Sanksi bagi pelaku kampanye colongan Pemilu 2019 meliputi peringatan tertulis, penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye, dan/atau penghentian

iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.

Terkait hal ini, Mellaz menegaskan, KPU periodenya tidak berpandangan sama dengan KPU periode sebelumnya. Namun, Mellaz membantah bahwa pihaknya tidak serius menegakkan aturan kampanye.

“Sanksi kan semuanya yang dimandatkan oleh undang-undang, itu pun juga yang lakukan (penindakan) lembaga lain (Bawaslu), bukan KPU. Itulah konstruksi yang kami susun di peraturan KPU tentang kampanye,” kata Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU itu.

Sementara itu, dalam beberapa bulan terakhir sudah bertebaran atribut partai di berbagai tempat umum. Hasil pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), April 2023, misalnya, mendapati 143 alat peraga kampanye di 16 provinsi terpampang di tempat umum.

Berdasarkan survei yang dilakukan JPPR terhadap warga di sekitar lokasi pemasangan atribut kampanye itu, mereka mengaku merasa terganggu. ●



## Pemilu Kamboja Layak Dicontoh

Proses pemilihan umum di Kamboja yang diikuti 18 partai politik pada 23 Juli 2023 menarik perhatian Ketua Delegasi Organisasi Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI), Agung Laksono. Agung menyoroti Daftar pemilih tetap (DPT) di Kamboja yang disertakan foto pemilih.

Agung memimpin rombongan CAPDI memantau langsung pemungutan suara hingga perhitungan suara pemilu di Kamboja di TPS Toul Krok Primary School dan di Indradevi High School, Kamboja, Minggu, 23 Juli 2023. CAPDI merupakan organisasi yang mempertemukan tokoh-tokoh partai politik maupun sipil dengan spektrum moderat.

CAPDI juga organisasi yang mengawasi sistem politik dan memantau pemilu di berbagai negara. Selain CAPDI, organisasi lainnya yang ikut memantau pemilu di Kamboja adalah International Conference of Asian Political Party



(ICAAP). Pemantau pemilu internasional ada 330 dari 65 negara.

Agung menyambangi 2 TPS dan melihat serangkaian proses pemungutan suara. Agung nampak melihat seksama daftar pemilihan tetap yang terlihat berbeda.

Agung dan rombongan delegasi

CAPDI tertarik melihat DPT yang terpampang di depan TPS. Rupanya, KPU Kamboja menyertakan foto pemilih dalam DPT tersebut. Petugas TPS nampak mencocokkan wajah pemilih dengan foto yang tertera sebelum masuk ke bilik suara.

Agung menyebut hal itu bisa dicontoh KPU Indonesia dalam proses pemilu. DPT yang menyertakan foto dapat mengurangi adanya kecurangan dalam pemilu.

“Saya melihat kalau di Kamboja saja bisa, tentu di negeri kita yang juga sama-sama mempunyai teknologi seperti ini bisa dilakukan. Kita nanti melihat urgensinya, tentu bisa dipertimbangkan KPU seperti ini, sehingga tidak mungkin ada yang tidak berhak mencoblos, kemudian orang ada joki dan sebagainya,” ujar Agung.

Agung menyebut DPT dengan disertakan foto pemilih adalah cara terbaik dalam proses pemilu. Selain itu, proses pemungutan suara di TPS di Kamboja juga sangat tertib.

“Dan ini cara terbaik ada foto, ada nama, setiap orang datang harus ditunjukkan id cardnya, sesuai tidak dengan yang ada, baru boleh proses selanjutnya sampai di tanda tinta melalui telunjuk,” ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu. ●





“Kalau tidak ada politik uang, jalan semakin baik, rumah sakit semakin baik, asuransi/BPJS akan semakin baik”

Rahmat Bagja

# INFO BAWASLU

Minggu IV • Juli 2023

11

## SERANGAN FAJAR BUKAN BERKAH

**Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak generasi muda, mahasiswa, dan masyarakat kelas menengah untuk menyerukan isu antipolitik uang. Sebab, tiga kelompok tersebut mampu memengaruhi pandangan politik masyarakat kelas lain.**

“Yang menentukan isu itu kaum muda dan kaum (kelas) menengah. Kalau isunya kaum muda dan menengah tanpa politik uang, maka teman-teman yang di bawah pasti akan mengikuti,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja.

Hal itu disampaikan Bagja dalam Workshop bertema Menyongsong Karir Politik dengan Penyelenggara Berintegritas yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Minggu, 23 Juli 2023.

Bagja menegaskan, isu yang harus dikampanyekan kelompok muda, mahasiswa, dan kelas masyarakat menengah harus kuat terkait tolak politik uang hingga kampanye antiserangan fajar.

“Gimana politik uang mau diberantas kalau mahasiswa dan kaum muda menganggap politik uang itu berkah, rejeki anak sholeh?” seru Bagja kepada peserta

workshop.

Alumnus Utrecht University itu meyakini apabila politik uang dalam Pemilu 2024 tidak ada, maka masyarakat akan semakin banyak mendapatkan kemanfaatan dari meningkatnya pelayanan publik oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

“Kalau tidak ada politik uang, jalan semakin baik, rumah sakit semakin baik, asuransi/BPJS akan semakin baik,” kata Bagja.

Bagja sebelumnya juga mengatakan bahwa saat ini serangan fajar atau politik uang sudah merambah ke penyelenggara pemilu.

Hal itu disampaikan Bagja ketika menghadiri launching kampanye Hajar Serangan Fajar di Pusat Edukasi Antikorupsi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juli 2023.

Untuk itu, Bagja meminta agar pemungutan suara, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga rekapitulasi suara harus diawasi.

“Serangan fajar atau politik uang ini sekarang sudah merambah pada penyelenggara pemilu. Nah, yang inilah kami beserta penyelenggara pemilu berusaha menjaga agar satu suara

yang hadir di TPS akan sampai satu suara pada rekapitulasi sampai di penghitungan akhir di KPU,” kata Bagja.

Bagja menyebut, pihaknya mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat sistem

penghitungan suara yang lebih transparan agar tidak terjadi politik uang.

“Kami mendorong KPU seluas-luasnya dan setransparan mungkin dalam membuat sistem penghitungan suara yang lebih baik lagi. Inilah yang ke depan serangan fajar atau politik uang menyasar pada penyelenggara pemilu ke depan,” ujar Bagja.

Lebih lanjut, Bagja juga berharap agar program Hajar Serangan Fajar yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa terus dikembangkan untuk mengantisipasi politik uang.

“Terakhir, kami mendukung penuh acara Hajar Serangan Fajar dan ini termasuk dalam program pengawas pemilu, yaitu disebut sebagai partisipatif. Salah satunya adalah membuat kampung anti politik uang, pemuda anti politik uang,” tutur Bagja.

“Tentu hal inilah yang akan diharapkan oleh partai politik pemilu dan tentu tidak akan menjadikan politik uang sebagai cara untuk meyakinkan pemilih,” sambungnya. ●



## ASN Paling Rawan Netralitas Dipertanyakan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan ada kerawanan yang luar biasa soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan, berdasarkan data yang dirilis Bawaslu, pada Pemilu 2019 terdapat 999 penanganan pelanggaran terkait netralitas ASN, di mana 89 persen Bawaslu merekomendasikan ke Komite ASN (KASN).

Kemudian, saat Pilkada 2020, terdapat 1.536 penanganan pelanggaran netralitas ASN dan 91 persen Bawaslu merekomendasikan ke KASN.

“Artinya, selama Pemilu 2019, sebanyak 89 persen dugaan pelanggaran hukum lainnya, utamanya berkenaan dengan netralitas ASN terbukti. Juga selama Pilkada 2020 sebanyak 91 persen terbukti penanganan pelanggaran Bawaslu. Karena itu ada kerawanan yang luar biasa

di netralitas ASN,” kata Lolly saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilu Serentak 2024 di Makassar, Kamis, 20 Juli 2023.

Menurut Lolly, ada tiga undang-undang yang menegaskan ASN harus bersikap netral. Pertama, UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana dalam Pasal 2 menyatakan setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada

kepentingan tertentu.

Kemudian, UU 7/2017 tentang Pemilu juga terdapat pasal soal netralitas ASN. Lalu, dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah terdapat dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN, yaitu Pasal 70 dan Pasal 71.

Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 bulan penjara dan denda paling

banyak Rp6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.

Kemudian, Pasal 71 ayat (1) berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 bulan penjara dan denda paling banyak Rp6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188.

“3 UU tersebut mengatur norma bahwa ASN harus netral. Tidak perlu bingung lagi, tiga undang-undang bicara soal ASN harus netral, apa yang boleh dan tidak boleh, juga ada dalam SKB lima lembaga,” tegasnya.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN tersebut, salah satu alat mitigasi yang akan segera diluncurkan menjelang kampanye yakni Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Netralitas ASN. ●





“Yang membedakan antar partai saat ini hanya soal bagaimana hubungan Islam dan politik”

*Djayadi Hanan*



# TANTANGAN PARTAI BARU MENUJU SENAYAN

**Partai-partai politik baru dan non-parlemen menghadapi sejumlah tantangan agar bisa melewati parliamentary threshold 4 persen.**

**D**irektur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, menguraikan sejumlah tantangan yang harus dihadapi.

Pertama, partai-partai politik dihadapkan pada Party ID (identitas partai) yang rendah. Kedua, volatilitas parpol tinggi di tingkat provinsi, namun cenderung rendah di tingkat nasional.

“Jadi ada kecenderungan lebih dari 50 persen pemilih akan memilih partai yang sama di Pemilu 2024,” ungkap Djayadi dalam Webinar Nasional bertema Tantangan dan Peluang Parpol Baru pada Pemilu 2024 yang digelar Moya Institute, Jumat, 21 Juli 2023.

Ketiga, minat pemilih untuk mendukung partai baru cenderung turun. Performa partai baru paling tinggi terjadi di tahun 2004.

“Total suara partai baru di 2004 itu 21,3 persen, hanya kalah dari Golkar yang memperoleh 22 persen lebih. Jumlah itu turun jadi 7,2 persen di 2009 dan seterusnya,” tutur Djayadi.

Keempat, jumlah partai yang masuk di parlemen dalam beberapa kali pemilu cenderung stabil. Artinya, pilihan orang cenderung stabil ke partai-partai yang sama.

“Usia rata-rata partai di atas 15 tahun. Hanya dua partai yang usianya 10 tahun lebih. Artinya partai-partai di DPR akan bertahan. Ini mempersulit partai baru untuk masuk,” sambungnya.

Kelima, parpol baru belum dikenal luas di publik. Partai baru hanya punya popular-

itas sekitar 60 persen untuk menopangnya masuk parlemen.

“Upaya sosialisasi partai menjadi kunci. Masalahnya adalah waktu tinggal kurang dari tujuh bulan. Perlu mempercepat kediklanan partai oleh masyarakat,” kata dia.

Keenam, semua partai politik memiliki kecenderungannya yang sama soal kebijakan ekonomi, politik, dan sosial. Parpol-parpol belum mampu saling membedakan diri dalam persoalan tersebut.

“Itulah yang menyebabkan pilihan terhadap partai menjadi stabil. Yang membedakan antar partai saat ini hanya soal bagaimana hubungan Islam dan politik. Pertanyaannya, partai baru mau main di ceruk mana?” kata Djayadi.

Meski begitu, masih ada peluang bagi parpol baru dan parpol nonparlemen untuk lolos parlementary threshold.

“Party ID di Indonesia sangat kecil. Artinya, secara teori, 85 persen pemilih Indonesia mudah pindah ke lain parpol. Jika hanya pakai satu indikator ini, swing voter menjadi sangat tinggi. Selain itu, pengguna internet juga sangat tinggi. Internet membuat semua partai punya peluang yang sama. Selain itu juga, pemilih Indonesia didominasi Gen Y dan Gen Z. Peluang terbuka bagi parpol baru jika bisa membaca peluang dari generasi muda ini,” paparnya.

Djayadi mengungkapkan, berdasarkan kajian sejak Pemilu 2024 ada tujuh faktor yangengaruhi suara ke parpol. Faktor itu yakni mempunyai tokoh yang memayungi semua dapil, citra parpol, perputaran mesin parpol, kemampuan memahami peta persaingan antar-parpol, kharisma kandidat di tingkat lokal, menyadari karakteristik pemilih, dan efek Pemilu.

Djayadi menjelaskan, parpol yang baru sebaiknya tidak bergantung kepada satu strategi guna meraup suara, tetapi perlu ditunjang pula dengan strategi yang cocok untuk tingkatan lokal dengan mengusung tokoh-tokoh lokal populer.

Pemerhati isu global dan strategis, Prof Dubes Imron Cotan, menuturkan, setiap parpol memiliki ruang dan peluang yang sama untuk meraup suara pemilih sebesar-besarnya pada pemilu yang akan datang.

Namun, secara khusus Imron menyoroti, parpol baru relatif lebih besar tantangannya, mulai dari proses pembentukannya yang tidak mudah, biaya yang tidak murah, sekaligus harus berhadapan dengan pertarungan elektoral melawan parpol yang sudah lama eksis.

Sementara ceruk suara pemilih semakin menyempit pada kisaran 15 persen berdasarkan temuan Kompas.

Imron menjelaskan bahwa untuk bisa merebut dukungan pemilih dan lolos electoral threshold, parpol baru dan parpol non-parlemen ditantang untuk bisa menghadirkan gagasan-gagasan baru dan segar, seraya menawarkan solusi bagi persoalan yang dihadapi Generasi Milenial dan Generasi Z, yang jumlahnya sekitar 50 persen dari 206 juta pemilih.

Penonjolan tokoh lokal berwawasan nasional dan global juga penting untuk memecah dominasi elite politik yang tertumpuk di kota-kota besar di Pulau Jawa. Kontestasi 2024 membuka peluang tersebut.

“Hal penting yang perlu dicatat adalah Generasi Milenial dan Generasi Z, terdeteksi tidak memiliki pilihan ideologi yang fixed, selain terpaku pada gadget. Jika mampu menarik dukungan generasi muda tersebut memanfaatkan gadget, parpol baru memiliki potensi untuk menyundul eksistensi parpol yang telah lahir lebih dahulu,” ujar Imron.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Siddiq, mengemukakan, ada konsekuensi yang diterima parpol baru dengan ditetapkannya secara bersamaan antara Pilpres dan Pileg 2024.

Menurutnya, perhelatan yang digelar bersamaan waktunya itu membuat perhatian masyarakat secara besar lebih terkon-

sentris pada pilpres dan meminggirkan isu tentang siapa saja yang akan lolos ke parlemen melalui pileg.

“Parpol yang punya capres lebih diuntungkan sebab dapat mendongkrak elektabilitas partainya, berbeda dengan parpol baru. Hal ini menuntut upaya ekstra parpol baru untuk melakukan sosialisasi. Salah-satunya caranya memang ikut-ikutan meng-endorse capres tertentu,” ucap Mahfudz.

Ketua Harian Partai Perindo TGB Zainul Majdi menyampaikan, peluang besar parpol baru pada era disrupsi ini adalah menjangkau pemilih Generasi Milenial dan Generasi Z yang jumlahnya sangat banyak.

“Pemilih muda cenderung ingin sesuatu yang baru, tidak ingin terikat pada pakem lama. Perjumpaan pilpres dan pileg bisa jadi tantangan dan peluang bagi parpol baru tersebut,” kata Zainul.

Zainul menyebut di tengah berbagai tantangan yang ada, parpol baru masih memiliki peluang dan kesempatan besar untuk dapat lolos ke parlemen atau meraih kursi di DPR.

“Contoh partai saya sendiri Perindo yang dalam 1,5 tahun terakhir mengalami elektabilitas naik dan itu terus meningkat hingga saat ini. Hal ini membuktikan penerimaan publik terhadap parpol baru terus ada. Apalagi, Perindo menjalankan program-program yang langsung menyentuh kehidupan kalangan bawah,” ujar Zainul.

Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto, menyampaikan, bagaimana pun dinamisnya konstestasi politik dan demokrasi 2024, diharapkan pemilu berlangsung secara demokratis, damai, dan dewasa sekaligus menghadirkan pemimpin yang mumpuni.

“Parpol lama dan baru sama-sama memiliki tantangan dan peluang. Narasi baru yang diusung mereka akan memberikan dampak yang berbeda. Identifikasi isu menjadi hal yang paling utama untuk meyakinkan pemilih,” ungkapnya. ●





“Dalam hal ini itu adalah keputusan partai, semua anggota harus mengikuti dan menghormati kebijakan partai”

Kris Dayanti

INFO  
CALEG

Minggu IV • Juli 2023

13

# NYALEG LAGI TINGGALKAN PAN

**Musisi Anang Hermansyah Kembali terjun ke kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, namun tanggungannya dari PDIP bukan PAN. Anang sebelumnya pernah menjadi anggota DPR periode 2014-2019 saat maju dengan menjadi kader PAN dari Dapil Jawa Timur IV.**

Kabar perihai Anang yang nyaleg di Pileg 2024 ini diungkap oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. Said mengatakan Anang maju dari Dapil V Jawa Barat, yakni Kabupaten Bogor.

“Betul, betul. Nyaleg Anang Hermansyah. (Dari dapil) Bogor,” kata Said, Selasa, 25 Juli 2023.

Anang buka-bukaan alasannya memilih bergabung ke partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini.

“Kalau aku bilang PDIP partai hebat, partai yang well managed. PDIP pengorganisasiannya keren, terbukti dengan dua kali pemilu dia leading. Dan bagaimana Pak Jokowi bisa sukses kepuasan publiknya 86 persen. Ini kan nggak main-main PDIP menyiapkan kader dengan baik,” kata Anang, Selasa, 25 Juli 2023.

Anang menyebut kontestasi pemilu sudah membuktikan PDIP sebagai partai yang kuat dan itu memantapkan pilihannya untuk terjun lagi ke pemilu.

Anang pun buka suara kenapa kini dirinya berlaga di Dapil Kabupaten Bogor. “Kabupaten Bogor istriku orang Bogor. Ashanty kan Bogor. Ibunya lahir di Bogor, kakeknya di Ibnu Chaldundi bikin auditorium Abdullah Siddik. Sudah jelas. Dekat dari Jakarta, jadi aku pulang baliknya gampang untuk urus konstituen,” ujar Anang.

Meski berlaga di daerah asal istrinya, Anang mengaku tetap akan berusaha keras untuk melenggang ke Senayan. “Ikhtiarnya harus kuat,” kata Anang.

Anang mengakui ada diskusi sebelum dirinya memutuskan nyaleg lewat PDIP. Anang mengaku nyaman ketika berdiskusi dengan para

politikus PDIP.

“Kalau aku ngomong diskusi, aku dekat sekali dengan temen-temen, waktu di parlemen dekat banget aku dengan PDIP. Deket, dalam pembahasan-pembahasan aku dekat. Nyaman diskusinya dengan teman-teman PDIP. Ya ada lah sejarahnya kenapa berlabuh ke situ,” ujarnya.

Anang melihat selama ini PDIP juga mampu dengan baik mengawasi dan mendukung para kader-kadernya berjuang untuk kepentingan rakyat.

“Kalau aku dekat dengan teman-teman PDIP sejak di parlemen. Dan aku senang dengan pemikiran-pemikiran Sukarno. Aku Sukarnois,” ujarnya.

Selain itu, Anang mengaku sosok bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo, merupakan pematiknya bergabung ke partai banteng itu.

“Kalau Ganjar itu juga salah satu magnetnya kenapa aku ke PDIP. Aku suka banget sama Ganjar, keren dia,” kata Anang.

Anang memastikan a k a n



mendukung pencalonan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ia mengatakan siap menjadi juru kampanye guna memenangkan Ganjar. Baginya, Ganjar merupakan figure yang tepat untuk menyelesaikan dan melanjutkan pelbagai kebijakan Presiden Jokowi.

“Ganjar orang yang mampu untuk menyelesaikan dan melanjutkan dalam pemikiran besar seorang Jokowi,” katanya.

Di sisi lain, PAN mengaku tidak permasalahan kepindahan Anang Hermansyah ke PDIP. Pasalnya, pindah partai merupakan hal yang wajar.

“Ya biasa kalau ada yang pindah partai,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan, Anang memang sudah tak aktif sejak tak lagi menjabat anggota DPR Fraksi PAN periode 2014-2019. Dia menyebut Anang tak ada masalah dengan PAN sebelum akhirnya pindah ke PDIP.

“Mas Anang sudah lima tahun enggak aktif semenjak tidak jadi anggota DPR. Enggak ada masalah sama Mas Anang, selama ini baik-baik saja,” ujarnya.

Yandri menuturkan, Anang tak berkomunikasi dengan PAN soal keputusan politiknya itu. Namun, dia menegaskan partainya tak mempersoalkan.

“Nggak ada (komunikasi dengan PAN). Tapi ya nggak apa-apa itu hak pribadinya Mas Anang,” katanya.

Sementara itu, Kris Dayanti turut berkommentar soal Anang Hermansyah yang kini satu partai dengannya di PDIP. Kris Dayanti bicara aturan partai yang harus diikuti.

“Dalam hal ini itu adalah keputusan partai, semua anggota harus mengikuti dan menghormati kebijakan partai,” kata Kris Dayanti. ●

## Pulau Dewata Istimewa dan Strategis

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui pengurus DPW Bali menggelar konsolidasi struktur dan calon anggota legislatif (caleg) untuk menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Denpasar.

Ketua DPW PKS Bali, Hilmun Nabi, menyampaikan, acara tersebut digelar untuk mengkokohkan soliditas dan semangat para caleg. Ia mengatakan soliditas bakal caleg diperlukan demi target PKS dalam pencapaian kursi legislatif di Pileg 2024.

Dia bilang, PKS Bali punya komitmen untuk meraih kepercayaan masyarakat Pulau Dewata dan menghadirkan berbagai program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

Sementara, Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, menyampaikan Bali sebagai provinsi yang istimewa dan strategis bagi PKS. Dia menyinggung status Bali yang dikenal luar negeri sebagai surga wisata.

Bagi Jazuli, Bali sebagai etalase Indonesia di mata dunia. “Oleh karena itu, PKS hadir di Bali untuk mengkokohkan posisi strategis Bali tersebut. PKS hadir menjadi bagian yang menjaga nilai-nilai budaya luhur masyarakat Bali,” kata Jazuli, Senin, 24 Juli 2023.

Dia menambahkan, struktur caleg dan kader PKS Bali harus bangga jadi warga Pulau Dewata. Dia berpesan agar terus menjaga karakteristik budaya dan kemajuan Bali.

Selain itu, penting juga untuk menjaga persatuan dan persaudaraan, serta membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, ormas, tokoh, ketua adat, hingga pemuka agama di Bali.

“Tunjukkan kecintaan yang luar biasa PKS kepada masyarakat Bali, pada adat istiadat dan budayanya serta pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan seluruh lapisan masyarakat di pulau dewata ini,” tutur Anggota Komisi I DPR tersebut.

Jazuli menuturkan, PKS adalah partainya seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Bali. Maka itu, PKS terbuka selebar-lebarnya bagi tokoh dan elemen masyarakat Bali yang mau berjuang melalui partai dakwah tersebut.

Lebih lanjut, Jazuli menitikkan pesan agar kader-kader PKS bisa beri sentuhan pelayanan dan advokasi yang maksimal terhadap seluruh lapisan masyarakat. Ia meminta agar kader di Bali sampaikan

perjuangan yang sudah dilakukan pengurus PKS pusat.

Kata dia, keberpihakan yang jelas pada rakyat serta penolakan terhadap kebijakan yang menyengsarakan rakyat harus diperjuangkan PKS.

Dia juga memberikan saran agar jajaran kader di Bali terus memperbanyak s i -



laturahmi. Kemudian, mau mendengar nasihat dan aspirasi para tokoh, pemuka agama, dan tetua adat.

Menurutnya, jika ada aspirasi terkait persoalan masyarakat dan pemerintahan Bali, bisa sampaikan langsung kepada elite PKS di DPR.

“Insya Allah kami akan berjuang dan kawal secara maksimal melalui kewenangan yang kami miliki,” tuturnya.

Jazuli kemudian meminta para kader bisa menjaga soliditas dalam menghadapi Pemilu 2024, terutama Pileg.

“Terus semangat, jaga soliditas, tunjukkan rasa cinta, hilangkan sekat. Bangun kolaborasi seluas-luasnya. Insya Allah PKS akan meraih kemenangan dan memperoleh kursi legislatif DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di Bali,” ujar Jazuli. ●



“Kami banyak pemimpin muda berprestasi yang bisa menjawab mimpi dan harapan anak muda demi kemajuan bangsa”

*Hasto Kristiyanto*



# JAGA LUMBUNG SUARA BANTENG

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menargetkan Jawa Tengah menjadi lumbung suara di Pemilu 2024.**

“Jateng harus kembali menjadi provinsi dengan suara terbanyak sehingga bisa kembali menang pemilu legislatif maupun pemilihan presiden,” kata Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, saat mengunjungi kantor DPC PDIP Kabupaten Kudus, Selasa, 25 Juli 2023.

Puan Maharani mengajak seluruh kader dan simpatisan PDIP di Kabupaten Kudus tetap solid dan kompak dalam upaya memenangkan Pemilu 2024 di Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara partai banteng moncong putih.

Puan juga meminta kader dan simpatisan PDIP di Kudus tetap solid dan kompak, sehingga partai berlambang kepala banteng moncong putih itu bisa menang untuk ketiga kalinya.

Tidak hanya itu, Puan juga menginstruksikan semua jajarannya merangkul semua pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan untuk membantu kemenangan Pemilu 2024.

Nantinya, semua jajaran PDIP di Jateng juga harus memasang foto capres dan cawapres, sekaligus untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan PDIP menang Pemilu 2024.

“Apa pun yang menjadi bahan sosialisasi dan kampanye harus dipasang karena nantinya parpol lain juga akan melakukan hal serupa,” ujarnya.

Puan menambahkan kunjungan ke Kabupaten Kudus merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penjajakan untuk melihat situasi di Jateng. Kota lain seperti Pekalongan juga akan menjadi tempat kunjungan berikutnya.

“Penjajakan dan konsolidasi partai ini sebagai salah satu persiapan menyambut tahun politik menjelang Pemilu 2024,” ujarnya.

Selain menemui kader dan simpatisan partai, Puan Maharani juga mengunjungi salah satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bordir di Desa Peganjaran, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

Selain Jateng, Puan juga optimistis Kalimantan Barat akan tetap menjadi lumbung suara pada Pemilu 2024. Untuk itu, ia meminta agar seluruh kader partai dapat menjaga soliditas.

“Yang perlu kita lakukan adalah menambah suara di tempat-tempat yang selama ini belum bisa kita tarik. Selama kita satu barisan, selama kita solid sampai 14 Februari 2024, maka insya Allah kita akan

menang lagi di Pemilu nanti. Kalbar bisa, Kalbar mampu nambah suaranya untuk PDI Perjuangan di 2024,” kata Puan.

Puan menyampaikan optimisme ini bukan tanpa sebab, melainkan karena tingginya semangat dan euforia para kader di berbagai daerah. Ia pun meyakini jika semangat para kader ditata, kemenangan di pesta demokrasi lima tahunan tersebut bakal mampu dipertahankan.

“Saya muter-muter di tiga kabupaten, satu kota di Kalbar. Ini saya merasakan euforia atau semangat teman-teman PDI Perjuangan di sini tuh sudah terbangun. Hanya memang perlu ditata supaya kita jadi satu pasukan,” lanjutnya.

Puan juga mengingatkan para kader partai untuk tidak terlena dengan hasil survei yang menempatkan PDIP di posisi teratas sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi. Pasalnya, untuk mempertahankan kemenangan pada Pemilu 2024, PDIP bakal menghadapi tantangan yang tidak ringan.

“Memang selalu ada survei dan selama beberapa tahun belakangan, partai kita selalu yang teratas. Ini (hasil survei) jangan sampai bikin kita jemawa karena yang lain-lain tidak ingin kita menang. Selalu akan ada upaya-upaya untuk menggagalkan itu, termasuk usaha untuk memecah belah kita. Ingat, selalu ingat, musuh kita bukanlah sesama kita, tetapi warna lain,” tegasnya.

PDIP juga menargetkan kemenangan perdana di Sumatera Barat pada Pemilu 2024. Untuk mewujudkan impian itu, PDIP menunjuk sosok generasi muda sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di daerah tersebut.

Bapilu 2024 PDIP Sumbar dip-

impin oleh Yogi Yolanda yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumbar. Pelantikan Yogi dilakukan saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP Sumbar di Hotel Mercure, Padang, Selasa, 4 Juli 2023.

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang hadir langsung dalam acara tersebut. Hasto mengatakan, dipilihnya sosok anak muda menjadi Ketua Bapilu menunjukkan bahwa PDIP sangat perhatian terhadap pemilih muda.

Selain itu, dia juga mengatakan daftar calon anggota legislatif (caleg), bahkan kepala daerah dari partainya banyak diisi oleh kader muda. Menurutnya, hal ini membuktikan PDIP sangat perhatian dengan anak muda.

Hasto  
ber-

harap, proses kaderisasi yang berjalan terus menerus, mampu melahirkan pemimpin muda dari PDIP. Hal tersebut juga diharapkan dapat menjawab mimpi-mimpi anak muda Indonesia.

“Kami banyak pemimpin muda berprestasi yang bisa menjawab mimpi dan harapan anak muda demi kemajuan bangsa,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, menyampaikan, generasi muda merupakan target yang ingin disasar pihaknya dalam pemilu 2024.

“Bappilu PDI Perjuangan Sumbar diisi oleh anak muda sehingga golongan tersebut dapat kami raup secara maksimal,” katanya.

Menurut dia, dalam Pilpres 2014, Presiden Jokowi meraih 23 persen suara di Sumbar dan turun pada 2019 menjadi 14 persen. “Kami siap memasang baliho-baliho partai serta melakukan sosialisasi meski banyak hambatan. Namun, kader PDI Perjuangan di Sumbar tidak akan menyerah,” kata dia.

Selain anak muda yang berusia di bawah 30 tahun, Yogi menyatakan pihaknya menjadikan kalangan perempuan sebagai target pemilih.

“Kami akan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang dekat dengan kalangan tersebut,” ujarnya.

Yogi menyatakan PDIP menargetkan perolehan dua kali lipat pada Pemilu 2024. Dia menyatakan, mereka menargetkan 2 kursi di DPR RI, 1 kursi di masing-masing Dapil DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“DPRD Provinsi Dapil 6 dan 8 kami targetkan dapat dua kursi. Bagi kami ini merupakan target yang besar, jika dilihat dari hasil dua kali pemilu sebelumnya,” kata dia.

Meskipun Sumatera Barat dikenal bukan basis PDIP, dia menyatakan optimis target itu bisa tercapai.

“Kami paham, Sumbar bukan basis dari PDI Perjuangan. Tetapi kami optimis kedepan PDI Perjuangan dapat diterima oleh hati masyarakat Sumbar. Kami akan coba lakukan pendekatan yang strategis untuk mendapatkan hati masyarakat Sumbar,” kata Yogi. ●







“Harus pintar memviral-viralkan sesuatu yang positif”

Ridwan Kamil

INFO  
DAPIL

Minggu IV • Juli 2023

15

# AGENDA GOLKAR DIGOYANG MUNASLUB

**Partai Golkar menyatakan tetap fokus pada trisukses di Pemilu 2024, yakni Sukses Pileg, Sukses Pilpres, dan Sukses Pilkada, di tengah isu adanya permintaan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).**

**W**akil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bidang Polhumkam, Samsul Hidayat, meminta para kader Partai Golkar di semua tingkatan sedang maksimal bekerja untuk kemenangan Pileg. Untuk Pilpres 2024 juga tetap mengamankan hasil Munas X Partai Golkar yang menetapkan Airlangga Hartarto sebagai capres.

Sedangkan, untuk sukses Pilkada hampir seluruh DPD Golkar kabupaten/kota di Indonesia telah melakukan tahapan penyaringan bakal calon kepala daerah sesuai Surat Perintah (Sprint) DPP Partai Golkar No.163. Kemudian, tahapan tersebut sementara dihentikan melalui Sprint DPP Golkar No.165 karena semua tingkatan harus fokus t a -

hapan final proses Pileg di Agustus 2023.

“Namun, penghentian tersebut tidak menggugurkan hasil penjurian calon kepala daerah yang sudah dilakukan kota/kabupaten sesuai Sprint DPP Golkar No.163, dan bagi yang belum melakukan tahapan sesuai sprint DPP Golkar No.163 tetap dibuka ruang untuk mempersiapkan nama calon kepala daerah,” ujarnya.

Terutama nama calon kepala daerah yang jauh hari sudah ditetapkan dalam forum Musda, Rakerda maupun Rapimda untuk kemudian diusulkan kepada DPD Partai Golkar provinsi maupun DPP Partai Golkar.

Ketua Bappilu Presiden Partai Golkar, Nusron Wahid, mengungkapkan, dalam dibalik isu Munaslub bertujuan untuk melengserkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Dia menyebut, dalam tersebut bermaksud untuk menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik di Pemilu2024.

“Yang menunggangi ya orang yang mau menggunakan kendaraan Golkar untuk proses pencapresan yang bersangkutan,” kata Nusron Wahid, Jakarta, Kamis,13 Juli 2023.

Selain itu, dia menyebut dalam tersebut menggunakan isu Munaslub untuk kepentingan sosok capres lainnya. Dia juga menilai isu Munaslub dijadikan sebagai peringatan bagi Partai Golkar dalam menghadapi kontestasi demokrasi di 2024 mendatang. Dia menegaskan, pihaknya tengah fokus perencanaan Pileg di 2024.

“Soal munaslub ya pertama yang usul kan orang yang enggak punya hak suara. Yang kedua ya waktu ya, timingnya itu kurang pas, sekarang ini kan konsentrasi orang itu sedang fokus kepada Pileg, sehingga belum ada pikiran ke sana,” ujar Nusron.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menegaskan, isu munaslub

tidak mengganggu soliditas partai berlabang pohon beringin tersebut untuk memenangkan Pemilu 2024.

Menurut Dave, pengurus dan para kader partai Golkar masih terus fokus melakukan kerja-kerja politik untuk mencapai target partai di Pemilu 2024.

“Saya dapat sampaikan bahwa per saat ini Golkar masih dalam keadaan solid, walau terlihat dari luar mendapatkan goyangan keras,” ujar Dave, Selasa, 25 Juli 2023.

Menurut Dave, isu munaslub tersebut tak membuat Partai Golkar terpecah. Dia pun mengimbau para kader agar fokus pada kerja-kerja politik menyosong Pilpres dan Pileg 2024.

“Golkar tidak pecah hanya karena hampasan-hampasan ombak kecil,” tandas Dave.

Diketahui, Golkar menargetkan memenangkan koalisi Partai Golkar di Pilpres 2024 dan meraih 115 kursi atau 20 persen kursi parlemen di Pileg 2024.

G o l k a r  
j u g a

menargetkan memenangkan 60 persen Pilkada 2024.

## Ajari Caleg Viral

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil, mengajari calon-calon anggota legislatif menaikkan pamor demi meningkatkan potensi jadi pemenang di Pemilu 2024. Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, memberi tips agar para caleg bisa viral, sehingga popularitasnya bisa naik.

“Tadi saya nasehatkan para caleg gimana caranya masuk berita online supaya kalau di Google namanya keluar. Harus pintar memviral-viralkan sesuatu yang positif,” kata Kang Emil, Rabu, 12 Juli 2023.

Kang Emil pun berharap kader Partai Golkar bisa mengambil pengalamannya yang pernah memenangkan dua kali Pilkada yaitu pada Pemilihan Wali Kota Bandung dan Pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, ia juga mengatakan kader dan caleg Partai Golkar perlu mengetahui karakter para calon pemilihnya. Menurutnya itu penting agar narasi yang disampaikan para kader tepat mengena.

“Lakukan keilmiah dulu dengan survei. Apa sih yang dibenak pemilih pemula? Jangan-jangan beda dengan bapaknya sama ortunya, sehingga caleg kalau datang ngomongnya tuh nyambung,” kata dia.

Kang Emil optimistis Partai Golkar bisa meraih banyak suara di Pemilu 2024. Bahkan, dia yakin Partai Golkar bisa menjadi pemenang. Akan tetapi, Kang Emil merasa perlu ada perubahan dalam cara berkampanye. Dia mengingatkan, jumlah pemilih di Pemilu 2024 nanti didominasi oleh generasi milenial dan gen Z.

“Intinya kita optimis Partai Golkar akan menang di 2024 asal mau mengubah cara berkampanye, mengambil hati rakyat karena dalam rentang lima tahun terjadi perubahan perilaku, jumlah pencoblos baru juga banyak, mereka kan belum pernah nyoblos dan mereka selalu mencari sosok-sosok itu pasti lewat jejak digital,” kata Kang Emil. ●





“Meski Erick Thohir bukan orang Jawa, justru unggul dengan 25 persen”

**Burhanuddin Muhtadi**



# ERICK THOHIR CAWAPRES PALING PANTAS

**Menteri BUMN, Erick Thohir, semakin mantap berada di posisi teratas dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Erick Thohir menjadi cawapres potensial dengan elektabilitas tertinggi.**

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 20-24 Juni 2023, dalam simulasi 22 nama semi terbuka, Erick Thohir menjadi bakal cawapres dengan elektabilitas tertinggi sebesar 18,5 persen. Lalu, di bawahnya ada Ridwan Kamil dengan 16,9 persen, Sandiaga Uno 11,8 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 11,4 persen.

Kemudian nama-nama lainnya mendapatkan elektabilitas di bawah 10 persen, yakni Khofifah Indar Parawansa 5,5 persen, Mahfud MD 4,9 persen, Gibran Rakabuming 2,9 persen, Andika Perkasa 2,8 persen, Airlangga Hartarto 1,1 persen, Gatot Nurmantyo 1,0 persen, Muhaimin Iskandar 0,8 persen, Susi Pudjiastuti 0,8 persen, Puan Maharani 0,7 persen, Tri Rismaharini 0,6 persen, Yahya Cholil Staquf 0,5 persen, Nasaruddin Umar 0,5 persen, Sri Mulyani 0,5 persen, Miftahul Achyar 0,4 persen, Said Aqil Siradj 0,3 persen, Tito Karnavian 0,1 persen, Moeldoko 0,1 persen, Salim Segaf Al-Jufri 0,0 persen, lainnya 0,4 persen, dan tidak tahu/tidak jawab 17,1 persen.

Erick Thohir juga masih menempati urutan teratas dalam bursa cawapres berdasarkan simulasi 17 nama semi terbuka yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Erick mencatatkan elektabilitas sebesar 19,0 persen.

Ridwan Kamil juga tetap berada di urutan kedua dengan elektabilitas 16,7 persen. Lalu, Sandiaga Uno dengan 14,0 persen dan AHY meraih 11,6 persen.

Nama-nama lainnya yang berada di bawah 10 persen yakni Khofifah Indar Parawansa dengan elektabilitas 6,0 persen, Mahfud MD 5,5 persen, Andika Perkasa

3,6 persen, Airlangga Hartarto 1,2 persen, Susi Pudjiastuti 1,0 persen, Gatot Nurmantyo 1,0 persen, Sri Mulyani 1,0 persen, Muhaimin Iskandar 0,7 persen, Tri Rismaharini 0,7 persen, Puan Maharani 0,7 persen, Tito Karnavian 0,1 persen, Moeldoko 0,1 persen, Salim Segaf Al-Jufri 0,0 persen, serta yang tidak tahu/tidak jawab 16,5 persen.

Sementara itu, dalam simulasi lima nama, Erick Thohir tetap unggul dibanding nama-nama populer lainnya dengan meraih elektabilitas 22,9 persen. Ridwan Kamil juga masih berada di urutan kedua dengan elektabilitas 20,1 persen.

Posisi ketiga ditempati Sandiaga Uno dengan elektabilitas 17,5 persen. Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, juga tetap berada di urutan keempat bursa cawapres dengan elektabilitas 12,5 persen. Sedangkan, Khofifah Indar Parawansa di posisi kelima dengan angka elektabilitas 9,8 persen. Adapun mereka yang tidak tahu/tidak jawab sebesar 17,1 persen.

“Nah, ini lima nama saja yang kami uji. Jadi kami kerucutkan terus. Hasilnya, konsisten seperti ini,” kata Direktur Eksekutif Indikator Indonesia, Burhanudin Muhtadi, dalam paparannya, Minggu, 23 Juli 2023.

Menurut Burhanudin, Erick Thohir menjadi cawapres yang paling dijagokan dan berhasil meraih ceruk besar dari etnis Jawa dan pemilih beragama Muslim.

Burhanuddin mengungkapkan,

pihaknya mengajukan daftar pertanyaan lima cawapres menurut demografi dan berdasarkan etnis. Hasilnya, 25 persen responden etnis Jawa memilih Erick Thohir.

“Meski Erick Thohir bukan orang Jawa, justru unggul dengan 25 persen,” ujar Burhanuddin.

Ketua Umum PSSI itu mengalahkan Sandiaga Uno yang meraih 18,7 persen, Ridwan Kamil 17,3 persen, Khofifah Indar Parawansa 14,3 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono 9,9 persen.

Etnis yang juga banyak mendukung Erick Thohir berdasarkan hasil survei tersebut adalah Minang dengan 42,9 persen. Erick mengalahkan Sandiaga Uno 32,9 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 14,6 persen, dan Ridwan Kamil 5,9 persen.

Berdasarkan pemilih beragama Islam dalam survei itu, Erick Thohir juga mampu unggul walau tipis. Dia meraih 21,8 persen atau dengan selisih tak jauh dari Ridwan Kamil yang meraih 21,2 persen.

Disusul Sandiaga Uno 18,8 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 13,3 persen, dan Khofifah Indar Parawansa dengan 10,9 persen.

Di mata para Nahdliyin, sebutan anggota Nahdlatul Ulama (NU), Erick Thohir yang jadi juga ketua seabad NU meraih 24,5 persen.

Dia unggul dari Ridwan Kamil 21 persen, Sandiaga Uno 16,9 persen, Khofifah Indar Parawansa 14,4 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono 10,5 persen.

Indikator Politik Indonesia juga mendalami pilihan cawapres itu berdasarkan kelompok generasi atau usia. Hasilnya, pemilih Erick Thohir sebagian besar berasal dari generasi muda, baik itu Generasi Z maupun Generasi Milenial.

“Di kalangan milenial, Erick unggul dengan angka 20,7 persen. Sedangkan di kalangan gen Z, angkanya lebih tinggi. Mencapai 26,5 persen,” ungkap Burhanuddin.

Kelompok milenial adalah penduduk berusia 27-42 tahun yang lahir antara tahun 1981-1996. Proporsinya mencakup 24 persen dari total penduduk Indonesia saat ini. Sedangkan, gen Z meliputi populasi berusia 26 tahun ke bawah yang lahir antara tahun 1997-2012. Proporsinya mencapai 39,1 persen dari total penduduk Indonesia saat ini.

Dua rival terdekat Erick, Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono hanya diunggulkan di kalangan gen X dan baby boomer. Elektabilitas Ridwan Kamil di kalangan gen X, populasi kelahiran 1965-1980 yang saat ini berusia 43-58 tahun, mencapai 16,9 persen.

Sedangkan, elektabilitas AHY di kalangan baby boomer, populasi kelahiran 1944-1964 yang saat ini berusia 59-79 tahun mencapai 16,1 persen.

Dengan mendominasi milenial dan gen Z, bisa dibayangkan, Erick cukup mempunyai modal untuk menguasai pemilih di Pemilu 2024. Apalagi, mengingat Pemilu 2024 akan dirajai pemilih muda.

Burhanudin memaparkan, berdasarkan Data Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih muda di bawah usia 40 tahun di Pemilu 2024 akan mencapai sekitar 107 juta dari total 204 juta pemilih, atau sekitar 53-55 persen. Kondisi ini membuat pemilih muda, memiliki peran penting di Pemilu 2024.

“Bagi penyelenggara pemilu, besarnya pemilih muda menjadi tantangan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sedangkan bagi para peserta pemilu, tantangannya adalah mengetahui aspirasi pemilih muda, dan menyesuaikan program yang sesuai dengan aspirasi tersebut,” jelas Burhan. ●

